

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DITINJAU
ASPEK KEUANGAN"
(Studi Empiris pada Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

ICUK SUPRIYADI
B 200 030 375

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan daerah integral dari pembangunan nasional. Karena pembangunan di daerah menjadi salah satu indikator atau penunjang demi terwujudnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang pemerintahan daerah dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagai revisi dari UU. No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004 bahwa pemerintah dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah propinsi dan pemerintah kota sebagai daerah otonomi. Selain itu, juga di keluarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sebagai revisi dari UU No. 25 tahun 1999. dari UU tersebut diharapkan lebih mendukung pemberdayaan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dengan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui

otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi ini dititik beratkan pada daerah kabupaten atau kota karena daerah kabupaten atau kota berhubungan langsung dengan masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam APBD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan megembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Kedudukan faktor keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintah sangat penting, karena pemerintahan daerah tidak akan dapat melaksanan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang mrupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri di

dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proposal yang lebih kecil dan Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah.

Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus berupaya terus-menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri. Untuk mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu diadakan pengukuran atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi. Meningkatnya PAD memberi indikasi yang baik dalam bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pembangunan. Peningkatan cakupan Pendapatan Asli Daerah dapat pula dilakukan dengan meningkatkan jumlah obyek dan subyek pajak dan tau retribusi daerah.

Untuk mengetahui kesiapan satu daerah dalam menghadapi otonomi daerah perlu diadakan suatu analisis terhadap kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam era otonomi daerah. Alat analisis yang dapat digunakan untuk

menganalisis kinerja keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis otonomi fiskal daerah atau otonomi desentralisasi fiskal. Otonomi desentralisasi fiskal (*local fiscal autonom*) adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu aspek penting dalam otonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis mengambil judul: "ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DITINJAU ASPEK KEUANGAN" (Studi Empiris pada Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan sebagai berikut "Bagaimana kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Eks Karesidenan Surakarta jika dilihat dari analisis desentralisasi fiskal?"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kinerja keuangan daerah kabupaten atau kota di Eks Karesidenan Surakarta tahun anggaran 2003 sampai dengan 2005 pada tujuh kabupaten yaitu: kota Surakarta, kabupaten Sukoharjo, kabupaten Wonogiri, kabupaten Karanganyar, kabupaten Sragen, kabupaten Boyolali, dan kabupaten Klaten.

2. Menganalisis derajat otonomi fiskal pemerintah daerah kabupaten/kota di Eks Karisidenan Surakarta yang ditekankan pada derajat otonomi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, dan upaya fiskal/posisi fiskal.
3. Membandingkan kinerja keuangan daerah antar pemerintah daerah kabupaten/kota di Eks Karisidenan Surakarta tahun anggaran 2003 sampai dengan 2005.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi instansi pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota di Eks Karisidenan Surakarta dapat dijadikan alternatif masukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerahnya melalui akuntabilitas kinerja pemerintah.
2. Bagi semua elemen masyarakat yang ingin mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Eks Karisidenan Surakarta, dapat berperan aktif dengan ikut serta mengawasi kinerja pemerintahan daerah sebagai perwujudan otonomi daerah yang demokratis.
3. Bagi penulis untuk mengembangkan wawasan, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan sesuai dengan teori yang telah didapatkan di bangku kuliah.
4. Dapat dijadikan landasan dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dapat dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN. Berisi tentang uraian mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI. Bab ini menguraikan tentang otonomi daerah, tinjauan tentang kemandirian daerah, desentralisasi fiskal daerah, keuangan daerah, kinerja keuangan daerah dengan tolak ukurnya serta tinjauan penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini membahas mengenai alat-alat analisis untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Membahas tentang keadaan umum daerah di Eks Karisidenan Surakarta, dan membahas analisis data yang dilakukan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB V PENUTUP. Berisi tentang kesimpulan analisis data dan saran yang diberikan kepada pemerintah daerah Eks Karisidenan surakarta dan keterbatasan penelitian.